

**KAJIAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PEMBIAYAAN DAERAH**



SKRIPSI OLEH:

MAHAPUTRI MIRANDA SAFTRI

01021381823136

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2022

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**KAJIAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK
PEMBANGUNAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBIAYAAN DAERAH**

Disusun Oleh:

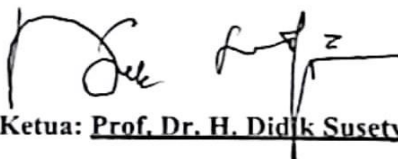
Nama : Mahaputri Miranda Safitri
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif


TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal: 30-09-2022.....


Ketua: Prof. Dr. H. Didik Susetvo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Tanggal: 27/9/2022.....


Anggota: Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

KAJIAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBIAYAAN DAERAH

Disusun Oleh:

Nama : Mahaputri Miranda Safitri
NIM : 01021381823136
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

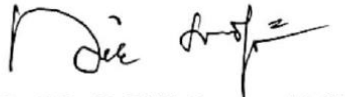
Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 12 Desember 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

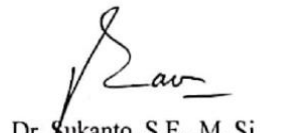
Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, Desember 2022


Ketua

Anggota

Anggota


Prof. Dr. H. Didik Susetwo., M. Si
NIP. 196007101987031003


Dr. Sukanto, S.E., M. Si
NIP. 197403252009121001


Dr. Siti Rohima, S. E. M. Si
NIP. 196903142014092001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M. Si
NIP. 197304062010121001



SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahaputri Miranda Safitri
NIM : 01021381823136
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Ekonomi Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

Kajian Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk Pembangunan dan Kontribusinya Terhadap Pembiayaan Daerah.

Pembimbing:

Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.,Si
Anggota : Dr. Sukanto, S.E. M., Si
Tanggal Ujian : 12 Desember 2022

Adalah benar hasil karya saya sendiri, dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 26 Desember 2022

Pembuat Pernyataan,



Mahaputri Miranda Safitri

NIM. 01021381823136



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Do not be afraid; I am with you all the time, listening and seeing.”

(Quran | 20:46)

“If you are grateful, I will surely give you more.”

(Quran | 14:07)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua Orangtuaku
- Kakak – Kakakku
- Keponakanku
- Keluarga Besarku
- Teman – Temanku
- Almamaterku

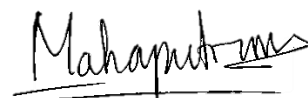
KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan ridhanya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kajian Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk Pembangunan & Kontribusinya terhadap Pembiayaan Daerah” yang membahas mengenai kelayakan penerbitan obligasi daerah di Provinsi Sumatera Selatan untuk membiayai pembangunan dan diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S-1) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari skripsi yang ditulis ini masih jauh dari kata sempurna karena terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu atas segala kekurangan dalam skripsi ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 26 Desember 2022

Penulis,



Mahaputri Miranda Safitri

NIM. 01021381823136

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak diberikan dukungan, bimbingan, bantuan dan saran. Karena penulis yakin tanpa semua bantuan & dukungan tersebut sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar - besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Isnurhadi, S.E., M.B.A., Ph.D. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Suhel, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing kedua saya yang telah meluangkan waktunya untuk

membimbing dan mengarahkan saya dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai.

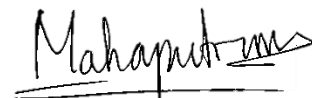
8. Bapak Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, S.E, M.Si. selaku Dosen Pembimbing pertama saya telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai.
10. Ibu Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, masukan dan kritik yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak Drs. Muhammad Teguh, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan.
12. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan saya ilmu, nasihat, motivasi dan inspirasi selama mengikuti pembelajaran.
13. Kedua Orangtuaku, Bapak Sofyan Djoem dan Ibu Rini Hartati yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa untukku selama ini sehingga akhirnya dapat menyelesaikan masa perkuliahan & skripsi ini dengan baik.
14. Kakakku Maharani Syahratu Kertapati, Frank Fardhu Firdaus, Dimas Surya Pranata, Rizky Carolin, Panji Anom Balaputradewa, Maya Puspytha, dan Maharaja Arizona yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi

dan doa untukku selama ini sehingga akhirnya dapat menyelesaikan masa perkuliahan & skripsi ini dengan baik.

15. Keponakanku Fereshteh Freyja Firdaus, Mahapatih Sultan Salahuddin, Fionnuala Faeiqa Firdaus, Maulana Malik Muhammad, Fitzdegea Fabumi Firdaus dan M. Mainaka Abinaya Panji yang telah memberikanku kebahagiaan dan membuatku terhibur dengan tingkah lucunya.
16. Seluruh teman – teman Ekonomi Pembangunan 2018 khususnya Salsabillah Maharani, M. Redho Andriyansyah, Rizki Akbar Romadhon, Wihansya Haspazah, Ricardo Siagian, Diky Candra dan M. Riyo Afriyansyah yang telah menemani, membantu dan menghibur selama masa perkuliahan yang telah ditempuh oleh penulis.
17. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih sebanyak - banyaknya atas bantuan, dukungan, dan doa sehingga penyusunan skripsi ini dilakukan dengan baik.

Palembang, 26 Desember 2022

Penulis,



Mahaputri Miranda Safitri

NIM. 01021381823136

ABSTRAK

KAJIAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBIAYAAN DAERAH

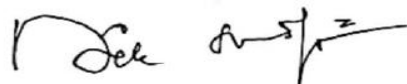
Oleh:

Mahaputri Miranda Safitri; Didik Susetyo; Sukanto

Kemampuan untuk melakukan inovasi dan keberanian mengelola risiko belum banyak dimiliki pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu untuk mendorong penerbitan obligasi daerah yang baik, pemerintah pusat harus mendukung semua pemerintah daerah dalam berinovasi pada pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemampuan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menerbitkan obligasi daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah. Teknik analisis yang menggunakan Data sekunder tahun 2011-2020 ditujukan untuk menghitung batas kumulatif pinjaman daerah, indeks kemampuan keuangan daerah menggunakan rasio *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*, kemandirian, efektivitas, belanja rutin, belanja modal serta menganalisis strategi yang diperlukan dalam penerbitan obligasi daerah menggunakan metode *Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT)*. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata perhitungan indikator kemampuan keuangan daerah masih relatif rendah dan sangat memerlukan bantuan dari eksternal. Hal ini ditunjukkan dari 5 indikator yang dianalisis tersebut mendukung untuk diterbitkannya obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, obligasi daerah diharapkan berpotensi dan menjadi solusi efektif sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Kata Kunci: Obligasi Daerah, Analisis SWOT, DSCR, Rasio

Ketua



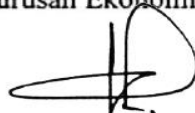
Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M., Si
NIP. 196007101987031003

Anggota



Dr. Sukanto, S.E. M., Si
NIP. 19740325009121001

Mengetahui
Ketua jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M., Si
NIP. 197304062010121001

ABSTRACT

STUDY OF THE ISSUANCE OF REGIONAL BONDS OF THE SOUTH SUMATERA PROVINCIAL GOVERNMENT FOR DEVELOPMENT AND ITS CONTRIBUTION TO REGIONAL FINANCING

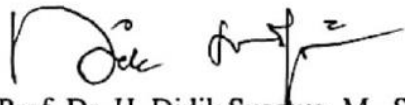
By:

Mahaputri Miranda Safitri; Didik Susetyo; Sukanto

Local governments in Indonesia still lack the ability to innovate and does not have the courage to manage risk. As a result, to encourage the issuance of good regional bonds, the central government must assist all local governments in their efforts to innovate in regional development. The purpose of this study was to assess the government of South Sumatra Province's ability to issue regional bonds in order to fund regional development. Analysis techniques using secondary data for 2011 - 2020 were intended to calculate the cumulative limit of regional loans, regional financial capacity index using the *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), independence, effectiveness, routine spending, capital spending and analyzing the strategies needed in issuing regional bonds using the *Strength Weakness Opportunity Threat* (SWOT) method. The results of the study showed that the average calculation of regional financial capacity indicators is still relatively low and requires external assistance. This was shown from the 5 indicators analyzed that support the issuance of regional bonds as a source of financing for regional development in the Province of South Sumatra. Therefore, regional bonds are expected to have potential and become an effective solution as an alternative source of financing for regional development.

Keywords: *Regional Bonds, The SWOT Analysis, DSCR, Ratio*

First Advisor



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M., Si
NIP. 196007101987031003

Member



Dr. Sukanto, S.E. M., Si
NIP. 19740325009121001

Acknowledge by,
Head of Development Economics Department



Dr. Mukhlis, S.E., M., Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

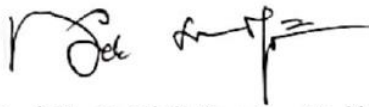
Nama : Mahaputri Miranda Safitri
NIM : 01021381823136
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan tensenya dan kami setuju untuk di tempatkan pada lembar abstrak.

Indralaya, 2022

Ketua

Anggota



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M. Si
NIP. 196007101987031003



Dr. Sykanto, S.E., M.Si
NIP. 19740325009121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Mahaputri Miranda Safitri

Jenis Kelamin : Perempuan

TTL : Palembang, 12 September 2000

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah : Jln. Tanjung Api – api Lr. Bambu Kuning No. 17A

Email : mahaputrimiranda@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 58 Palembang

SMP : SMP Negeri 3 Palembang

SMA : SMA Negeri 3 Palembang

PENGALAMAN ORGANISASI

Staff Muda Dinas Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM)
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya 2019

Staff Ahli Media & Informasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas
Sriwijaya 2020

Staff Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya
2020

Sekretaris Divisi Media & Informasi Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Universitas Sriwijaya 2021

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Desentralisasi Fiskal.....	12
2.1.2 Pembiayaan Daerah	14
2.1.3 Pinjaman Daerah	15
2.1.4 Obligasi Daerah.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pikir	31
BAB III	32
METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	32
3.2 Jenis & Sumber Data.....	32
3.3 Metode Pengumpulan Data	33
3.4 Teknik Analisis	33
3.5 Definisi Variabel	40

BAB IV	42
HASIL DAN PEMBAHASAN	42
8.1 Gambaran Umum	42
8.1.1 Provinsi Sumatera Selatan	42
8.1.2 Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.....	43
8.1.3 Pinjaman Daerah di Provinsi Sumatera Selatan	44
8.1.4 Obligasi Daerah di Provinsi Sumatera Selatan	44
8.2 Hasil Penelitian	45
8.2.1 Analisis SWOT	45
8.2.2 Analisis Batas Kumulatif Pinjaman	52
8.2.3 Analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	56
8.2.4 Analisis Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	58
8.2.5 Analisis Rasio Efektivitas Provinsi Sumatera Selatan	60
8.2.6 Analisis Rasio Belanja Rutin (Operasi) Provinsi Sumatera Selatan.....	62
8.2.7 Analisis Rasio Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan	64
8.2.8 Analisis Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan	67
8.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	70
8.3.1 Indikator Penerbitan Obligasi Daerah.....	70
8.3.2 Obligasi Daerah Solusi Efektif Pembiayaan Pembangunan Daerah	75
BAB V	78
KESIMPULAN & SARAN	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan	5
Tabel 2. Matriks SWOT.....	35
Tabel 3. Identifikasi SWOT	49
Tabel 4. Penerimaan Umum Daerah Tahun 2021.....	54
Tabel 5. Perhitungan DSCR Provinsi Sumatera Selatan	56
Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah	59
Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas	61
Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Rutin	62
Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal.....	65
Tabel 10. Opini BPK atas LKPD Sumatera Selatan	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rasio Kemandirian Daerah (%).....	2
Gambar 2. Ruang Fiskal Provinsi Sumatera Selatan (%)	3
Gambar 3. Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4. Peta Provinsi Sumatera Selatan	42
Gambar 5. Penerimaan Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	52
Gambar 6. Perkembangan DSCR Provinsi Sumatera Selatan	57
Gambar 7. Perkembangan Rasio Belanja Rutin Provinsi Sumatera Selatan	63
Gambar 8. Perkembangan Rasio Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Ruang Fiskal	84
Lampiran 2 Penerimaan Umum Daerah	84
Lampiran 3 Perhitungan Debt Service Coverage Ratio	85

BAB I

PENDAHULUAN

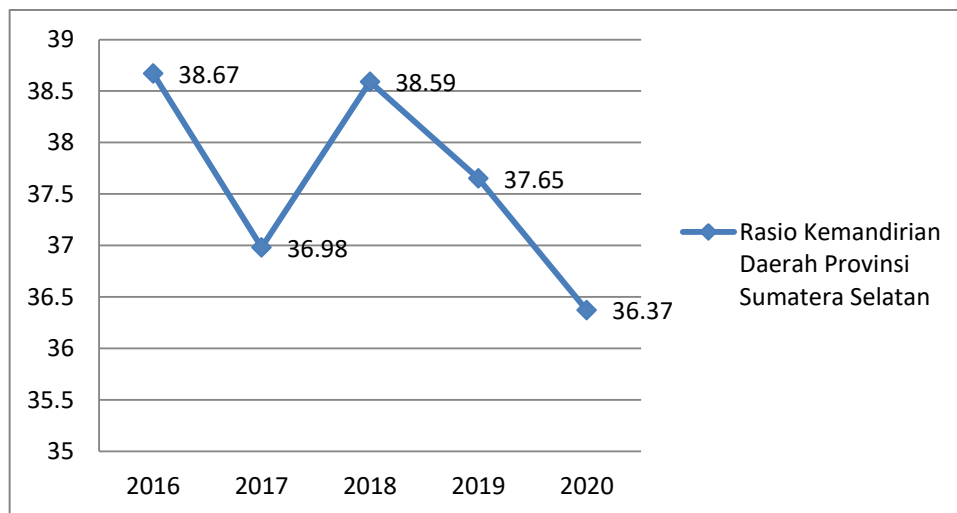
1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah saat ini menjadi hal yang terpenting untuk menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Berpegang pada semangat akselerasi berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendorong investasi, memberikan fasilitas dan pelayanan yang berkualitas pada beragam sektor yang berhubungan dengan infrastruktur (Bappenas, 2020). Dalam hal peningkatan kualitas pembangunan, salah satu yang menjadi tugas pemerintah adalah menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan di daerah yakni dimulai dari proses perencanaan sampai dengan proses evaluasinya.

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya dengan baik serta pemberdayaan kekayaan alam maupun manusia dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan secara optimal.

Penilaian terhadap suatu daerah terhadap kemampuan mengelola keuangannya dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah. Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud

dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat harus menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah itu sendiri. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan cara Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan. Semakin tinggi angka rasio menunjukkan tingginya kemandirian keuangan pemerintah daerah. Kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

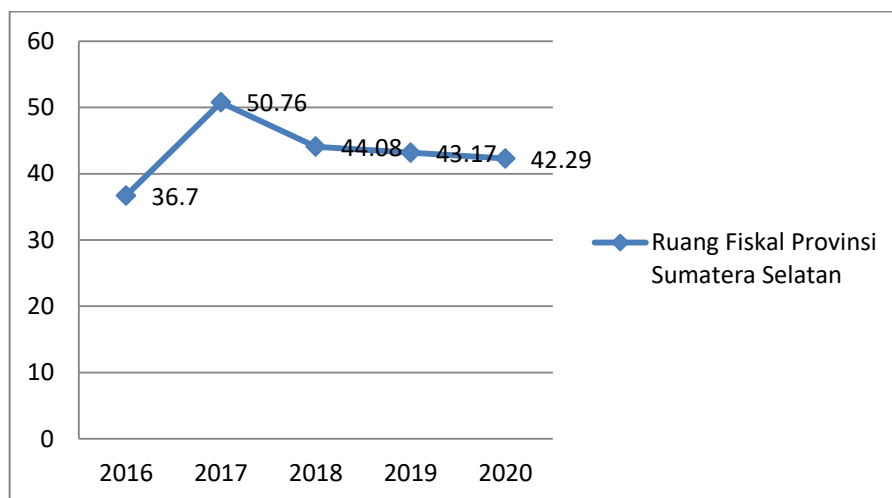


Gambar 1. Rasio Kemandirian Daerah (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Perkembangan kemandirian daerah tahun 2016-2020 di Sumatera Selatan cenderung mengalami fluktuatif terdapat pada Gambar 1 rasio kemandirian daerah Sumatera Selatan pada tahun 2016 sebesar 38,67% dan pada tahun 2020 sebesar 36,37% turun 2,3% mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan dana dari pusat untuk meningkatkan fasilitas fiskal untuk menambah pendapatan daerah.

Ruang fiskal secara umum mengacu pada ketersediaan ruang anggaran yang memungkinkan pemerintah menyediakan dana untuk tujuan tertentu tanpa membahayakan kesinambungan keuangan pemerintah. Kesinambungan artinya berfokus pada implikasi jangka menengah dari pengeluaran program – program yang dapat menciptakan ruang fiskal. Kebijakan fiskal dan ruang fiskal saling terkait dalam arti ruang fiskal dapat diperluas jika kebijakan fiskal dilaksanakan dengan benar. Artinya kebijakan fiskal nasional dan daerah berpengaruh signifikan terhadap ruang fiskal daerah. Dengan catatan, pemerintah harus menjaga ketahanan fiskal. Gambar 2 menunjukkan ruang fiskal Provinsi Sumatera Selatan periode 2016-2020.



Gambar 2. Ruang Fiskal Provinsi Sumatera Selatan (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Ruang fiskal merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal ini diperoleh dengan

menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja yang bersifat mengikat. Ruang fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggarannya digunakan untuk belanja rutin dan belanja yang sudah ditentukan penggunaannya.

Gambar 2 menunjukkan ruang fiskal Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu yang sama mengalami kenaikan pada tahun 2017 yang semula 36,70% menjadi 50,76% tetapi turun kembali menjadi 42,29% pada tahun 2020 atau menurun sebesar 8,47%. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah harus menentukan prioritas belanjanya. Diharapkan juga pemerintah daerah dapat efektif dan efisien dalam menggunakan anggarannya sehingga dapat tercipta ruang fiskal yang lebih besar.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gambaran hasil kinerja pencapaian daerah pada hal – hal tertentu yang menggunakan dana berupa pengeluaran, pembiayaan dan penerimaan dana. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Agar informasi yang disajikan dapat berguna bagi pihak – pihak yang berkepentingan maka informasi yang diberikan dalam laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yang memungkinkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Pemberian opini ini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Pada tabel 2 menunjukkan capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah dinilai oleh

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan

No	Pemerintah Daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sumatera Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan, diolah

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa Opini Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 kali berturut – turut mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Memiliki opini WTP tidak berarti menghilangkan kesalahan dan penyajian laporan keuangan yang tidak akurat karena tidak ada korelasi antara perolehan opini WTP dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus bekerja keras untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel demi tercapainya kepentingan masyarakat.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah memberikan opini penilaian terhadap pelaksanaan APBD provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia secara rutin setiap tahunnya. Dalam setiap pemeriksaan keuangan baik negara maupun daerah ada beberapa aspek yang digunakan sebagai dasar untuk pemeriksaan laporan keuangan daerah yaitu ada dan tidaknya (1) indikasi kerugian negara/daerah, (2) penyimpangan administrasi, kekurangan pendapatan, ketidakhematan, dan tidak menguntungkan. Dari aspek tersebut ada beberapa indikator yang dijadikan dasar penilaian dan pemberian opini oleh pemeriksa. Berdasarkan

peraturan perundang –undangan audit atas laporan keuangan ini memiliki prosedur standar operasi dan ruang lingkup laporan keuangan yang komprehensif (Susetyo, 2009).

Menurut Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (2020) jika belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah daerah masih belum sepenuhnya diyakini kewajarannya disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu adanya (1) kelemahan sistem pengendalian intern, (2) belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, (3) tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, (4) penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (5) kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, (6) kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

Beragam masalah yang dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yaitu yang berkaitan dengan sumber dana untuk pembiayaannya. Menurut pemerintah daerah, sumber pembiayaan tersebut umumnya berasal dari usaha yang dilakukan daerah itu sendiri yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang diperoleh dan juga berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu tantangan pemerintah daerah dalam era desentralisasi fiskal perlu menjadi perhatian agar pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sebagai pelayan publik (*public servant*). Pemerintah daerah tidak hanya memiliki kapasitas untuk mengelola pendapatan atau pengeluaran saja tetapi juga memiliki kapasitas untuk

meningkatkan pendapatan dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Setiadi, 2012).

Provinsi Sumatera Selatan yang sedang marak melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, jalan tol, dan lain lain membutuhkan pendanaan dari berbagai sumber. Sumber pendanaan ini tentunya tidak selalu ditanggung oleh APBN dan kemampuan fiskal dalam APBN juga tidak akan mampu mengatasi permasalahan infrastruktur di segala wilayah yang ada di Indonesia, karena banyak sektor lain juga yang harus ditingkatkan. Namun, beberapa daerah mengalami defisit anggaran untuk memenuhi belanja daerah. Pemerintah daerah berupaya melakukan inovasi untuk menutupi defisit anggaran tersebut, menutupinya berlandaskan pada masalah yang jelas seperti kebutuhan membangun infrastruktur.

Salah satu pilihannya adalah melakukan pinjaman daerah dari beragam sumber, seperti pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Salah satu produk pembiayaan daerah yang sudah diregulasi adalah obligasi daerah. Produk pembiayaan ini dapat memenuhi kebutuhan daerah dalam hal belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Masalah utamanya adalah tidak semua pemerintah daerah dapat memenuhi syarat untuk menerbitkan obligasi daerah karena ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi.

Penerbitan obligasi daerah yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 111/PMK.07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah prosedurnya dimulai dari penetapan

kegiatan, kemudian melaksanakan persiapan kegiatan, mengajukan persetujuan DPRD, mengajukan usulan penerbitan kepada menteri keuangan, membuat peraturan daerah dan penawaran umum dipasar modal serta harus memenuhi pengelolaan obligasi daerah itu sendiri. Oleh karena itu, prosedur – prosedur tersebut memberikan kesan bahwa penerbitan obligasi daerah rumit dan panjang (Yulianti, 2018).

Menurut Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, persyaratan untuk menerbitkan obligasi daerah harus sesuai dan kapasitas sisa pinjaman daerah ditambah dengan jumlah pinjaman yang tidak dapat melebihi 75% dari total pendapatan menyeluruh APBD tahun sebelumnya. Pemerintah daerah hanya dapat menerbitkan obligasi daerah untuk mendanai kegiatan investasi sektor publik yang menciptakan pendapatan dan memberikan keuntungan bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Komponen yang akan dibahas pada penelitian ini ialah kajian penerbitan obligasi daerah dilihat dari data realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan yang dapat menentukan batas kumulatif pinjaman daerah, menghitung rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang bertujuan untuk melihat apakah pemerintah mampu melunasi pinjaman mencakup utang jangka pendek maupun jangka panjang, menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas, belanja rutin, belanja modal, menganalisis strategi yang diperlukan dalam penerbitan obligasi daerah menggunakan metode *Strength*

Weakness Opportunity Threat (SWOT) dan yang terakhir melihat opini laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2011 hingga tahun 2020.

Obligasi daerah sebagai sumber pendanaan sudah lama dijadikan bahan pembahasan. Jika sekiranya penerbitan obligasi daerah memungkinkan maka dalam struktur APBD obligasi daerah menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah (Okta & Kaluge, 2011). Ada beberapa daerah yang diduga akan menerbitkan obligasi daerah seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah tetapi sampai sekarang belum terealisasi. Wacana penerbitan obligasi daerah sebenarnya sudah muncul sejak 5-10 tahun lalu hanya saja belum ada yang menerbitkannya hingga sekarang karena ada beberapa kendala utama seperti tingkat pemahaman daerah, hambatan regulasi, kemampuan inovasi di daerah, kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia yang masih belum memahami tentang obligasi daerah.

Kemampuan untuk melakukan inovasi dan keberanian mengelola risiko belum banyak dimiliki pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mendorong penerbitan obligasi daerah yang baik, Pemerintah Pusat perlu mendukung semua Pemerintah Daerah dalam berinovasi pada pembangunan daerah. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana obligasi daerah di Provinsi Sumatera Selatan dapat diterbitkan dan dapat menjadi solusi efektif terhadap pembiayaan pembangunan daerah serta diharapkan penelitian ini menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana indikator dalam menerbitkan obligasi daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana obligasi daerah menjadi solusi efektif dalam pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk:

1. Menganalisis indikator Obligasi Daerah yang dapat diterbitkan di Provinsi Sumatera Selatan
2. Menganalisis Obligasi Daerah efektif dalam pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan dan pengembangan ilmu tentang obligasi daerah,
 - b. Mengetahui kelayakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan obligasi daerah, dan

- c. Diharapkan menjadi sumber literatur untuk para akademis mengenai penerbitan obligasi daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan teori - teori yang dipelajari dalam penelitian ini dapat diterapkan dan memberikan wawasan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum mengenai penerbitan obligasi daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu keuangan daerah, khususnya obligasi daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adika, S. (2020). *Obligasi Daerah: Solusi Efektif Pembiayaan Pembangunan Daerah?* 1–11.
- Ahmad, A. W. (2021). *Analisis kelayakan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah untuk pembangunan daerah pada pemerintah provinsi sumatera barat.* 7(1), 146–161.
- Ambarwati, D. I., Hamid, E. S., & Suprihanto, J. (2016). Kelayakan Pembiayaan Obligasi Daerah Untuk Pembangunan Proyek Bus Rapid Trans (Brt) guna Menunjang Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22, 267–284.
- Azriya, Niar; Sari, Deviana; Risnad, A. (2021). Analisis Pembiayaan Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Melalui Penerbitan Obligasi Daerah. *Jurnal Visionist*, 10(September), 1–13.
- Bappenas, (2020) *BAB 33 Percepatan Pembangunan Infrastruktur*
<https://www.bappenas.go.id>
- Bisnis.com, (2021) *Pemda di Sumsel Ajukan Pinjaman PEN Rp. 1,49 Triliun*
<https://sumatra.bisnis.com/read/20210614/534/1405244/pemda-di-sumsel-ajukan-pinjaman-pen-rp149-triliun>
- Buditiawan, K., & Santoso, E. B. (2022). Rasio Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Infrastruktur di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Politik Dan Kebijakan*, Vol. 19 No(Mei 2022), 21–30.
- Christia, A. M., Ispriyarso, B., Studi, P., Ilmu, M., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). *Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di indonesia.* 15.
- Eltrudis, D. (2022). On the Financial Autonomy of European Local Governments: The Case of Municipal Bonds in Italy. *European Research Studies Journal*, XXV(Issue 1), 226–242. <https://doi.org/10.35808/ersj/2839>

- Feng, X. (2013). Local government debt and municipal bonds in China: Problems and a framework of Rules. *Copenhagen Journal of Asian Studies*, 31(2), 23–53. <https://doi.org/10.22439/cjas.v31i2.4332>
- Firdaus. (2015). *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis*. 1(2), 32–43.
- Fitria, R., Of, I., Bonds, M., An, A., Financing, A., & Pendahuluan, A. (n.d.). *Menanti kesiapan daerah menerima kesempatan dan tantangan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan*.
- Irwan Suriadi, Siti Sriningsih, & Hailuddin. (2020). Analisis Peluang Dan Tantangan Penerbitan Sukuk Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Di Nusa Tenggara Barat (NTB). *Journal of Economics and Business*, 6(2), 28–57. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v6i2.46>
- Ivanyshyn, V., & Pecheniuk, A. (2021). Municipal Bonds as a Financial Component of the Development of Territorial Communities in Ukraine. *Journal of Policy & Governance*, 21–29. <https://doi.org/10.33002/jpg010102>
- Kementrian Keuangan, (2021) *Kebijakan Obligasi Daerah*
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, (2021) *Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia* <https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/>
- Okta, D., & Kaluge, D. (2011). Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah. *Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah*, 005(02), 157–171. <https://doi.org/10.21776/ub/jiae/2016/005.02.7>
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Among Makarti*, 14(2), 1–12. <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.213>
- Puspita, D., Merita, P., & Hadi, S. (n.d.). *Dua Dekade Implementasi*

Desentralisasi Fiskal di Indonesia.

- Ramakrishna Nallathiga. (2015). Municipal Bonds As a Source of Finance for Urban Infrastructure Development in India by Ramakrishna Nallathiga :: SSRN. *Nagarlok*, XLVII(3), 57–72.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2930028
- Sofi, I. (2020). Analisis Kelayakan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah. *Journal of Public Financial Management, Vol. 4, No*, 1–15.
- Surachman, E. N., & Setiawan, H. (2016). Municipal Bonds As the Financing Strategy for Urban Infrastructure : Case Study of Jakarta Mrt. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(3), 369–381.
<https://doi.org/10.26905/jkdp.v20i3.283>
- Susetyo, D. (2009). Implikasi Ekonomi Atas Opini Penilaian Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1–13.
<https://core.ac.uk/download/pdf/267824256.pdf>
- Triyansyah, T., Aini, N., & Hana, K. F. (2020). Obligasi Daerah Yang “Tak Kunjung” Terbit Sebagai Salah Satu Faktor Perkembangan Daerah. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 59–78.
<https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i1.3863>
- Tumanggor, M. S. (2020). Issuance of Municipal Bonds through Capital Markets as Financial Revenue for Regional Development. *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII(Issue 3), 326–334.
<https://doi.org/10.35808/ijeba/519>
- Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi Publik*.
- Yulianti, A. D. (2018). Strategi Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Sumber Penerimaan Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Economics*

Development Analysis Journal, 7(3), 268–275.
<https://doi.org/10.15294/edaj.v7i3.25260>

Yusesa, G., & Arza, F. I. (2020). Analisis Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Wahana Riset Akuntansi*, 8(1), 50.
<https://doi.org/10.24036/wra.v8i1.109021>

Zedan, K., Daas, G., & Awwad, Y. (2020). Municipal bonds as a tool for financing capital investment in local government units in Palestine. *Investment Management and Financial Innovations*, 17(1), 213–226.
[https://doi.org/10.21511/imfi.17\(1\).2020.19](https://doi.org/10.21511/imfi.17(1).2020.19) |